



Dekonstruksi Narasi Sejarah Perempuan dari Perspektif Kritis Guru Sejarah

Aulia Novemy Dhita,^{1,2*} Nana Supriatna,¹ Didin Saripudin,¹ Erlina Wiyanarti¹

¹Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

²Universitas Sriwijaya, Indonesia

*dhitaa@upi.edu

Dikirim: 17-02-2025; Direvisi: 25-04-2025; Diterima: 27-04-2025; Diterbitkan: 30-04-2025

Abstrak: Pendidikan sejarah merupakan instrumen politik dan penanaman ideologis yang strategis. Kecenderungan ini menciptakan dominasi *grand narrative* terhadap wacana dalam pendidikan sejarah sehingga menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan. Representasi perempuan seringkali bernarasi tunggal dan maskulin. Seperti halnya Kartini menjadi tokoh yang paling dikultuskan sehingga mengabaikan peran perempuan lain. Narasi sejarah juga seringkali mengutamakan keterlibatan perempuan sebagai pejuang atau politisi. Ketimpangan tersebut dapat diatasi melalui peran guru sejarah kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana guru sejarah mendekonstruksi narasi sejarah perempuan melalui perspektif kritis. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan dekonstruksi terhadap narasi sejarah perempuan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian yaitu guru sejarah SMA Negeri Sumatera Selatan dan SMA Lifeskill Teknologi Informatika Indo Global Mandiri (LTI IGM) di kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sejarah kritis melakukan dekonstruksi terhadap Kartini dan menawarkan alternatif tokoh sejarah lain. Guru sejarah juga mengkritisi narasi perempuan yang lebih fokus pada keterlibatannya sebagai pejuang atau politisi dengan menghadirkan tokoh seperti Dewi Sartika. Melalui *Sakola Kautamaan Istri* yang didirikan oleh Dewi Sartika, guru sejarah menekankan bahwa ranah domestik relevan dengan sejarah. Dekonstruksi yang dilakukan oleh guru sejarah terhadap narasi perempuan yang dominan akan menciptakan representasi peran perempuan dalam sejarah yang lebih beragam. Hal tersebut pada akhirnya akan menciptakan pembelajaran sejarah kritis dan inklusif.

Kata Kunci: dekonstruksi; guru sejarah kritis; sejarah perempuan

Abstract: History education is a strategic instrument for politics and ideological indoctrination. This tendency creates the dominance of the grand narrative in historical education, leading to injustice toward women. Women's representation is often singular and masculine in nature. For instance, Kartini is highly revered, overshadowing the contributions of other women. Historical narratives also frequently prioritize women's involvement as warriors or politicians. This imbalance can be addressed through the role of critical history teachers. This study aims to analyze how history teachers deconstruct women's historical narratives from a critical perspective. The research employs a case study method with a deconstructive approach to women's historical narratives. Data collection is conducted through interviews and documentation. The research subjects are history teachers from Sumatera Selatan Senior High School and Lifeskill Teknologi Informatika Indo Global Mandiri (LTI IGM) Senior High School in Palembang. The research findings indicate that critical history teachers deconstruct Kartini's narrative and offer alternative historical figures. They also critique the dominant narrative that primarily highlights women as warriors or politicians by introducing figures such as Dewi Sartika. Through Dewi Sartika's *Sakola Kautamaan Istri*, history teachers emphasize the relevance of the domestic sphere in history. The deconstruction of dominant women's

narratives by history teachers fosters a more diverse representation of women's roles in history. Ultimately, this approach contributes to critical and inclusive history education.

Keywords: deconstruction; critical history teacher; women's history



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Sejarah perempuan di Indonesia sering kali dipahami melalui narasi yang didominasi oleh kekuatan politik, sosial, dan budaya. Dari 206 tokoh yang dianugerahi pahlawan nasional, 16 diantaranya tokoh perempuan. Ketimpangan ini, meskipun sebagian disebabkan oleh tantangan administratif dalam proses pengajuan, mencerminkan kecenderungan yang mengabaikan dan meminggirkan peran penting perempuan dalam perjalanan sejarah bangsa. Dari sejumlah 16 pahlawan nasional perempuan tersebut, Kartini menjadi tokoh yang paling dikultuskan. Hal ini dapat dilihat dari penetapan secara nasional 21 April sebagai Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini kerap dikaitkan dengan penggunaan kebaya, pakaian yang identik dengan Kartini, sehingga semakin mengukuhkan citranya. Beragam media turut memperkuat citra Kartini sebagai ikon perempuan Indonesia. Sejumlah film yang mengisahkan Kartini, seperti *R.A. Kartini* (1982), *Surat Cinta untuk Kartini* (2016), dan *Kartini* (2017), semakin memperkuat pengaruhnya. Produksi buku juga berkontribusi dalam melestarikan cerita tentang Kartini, mulai dari kumpulan suratnya dalam buku berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang* (1922) yang diterbitkan oleh J. H. Abendanon, hingga *Panggil Aku Kartini Saja* (1962) karya Pramoedya Ananta Toer. Nama Kartini diabadikan pula dalam majalah populer khusus perempuan, *Kartini*, yang pertama kali terbit pada tahun 1973 serta lagu *Ibu Kita Kartini* (1928). Selain itu, foto Kartini menjadi yang paling banyak dipajang di kelas dibandingkan dengan foto pahlawan perempuan lainnya.

Berbagai produksi tersebut menciptakan narasi tunggal dan tidak inklusif mengenai tokoh perempuan Indonesia. Namun, narasi yang terus-menerus diproduksi ini telah mengakar secara nasional dan menjadi bagian dari memori kolektif bangsa. Penggunaan kebaya yang rutin dilakukan setiap peringatan Hari Kartini semakin mempertegas posisi Kartini sebagai simbol perempuan sukses dalam bidang pendidikan dan dunia kerja (Muhammad, 2016). Kesuksesan ini merepresentasikan modernisasi sekaligus keberhasilan perjuangan perempuan untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki di ruang publik (karir), sejalan dengan semangat feminisme. Ditengah promosi yang mendorong semangat perempuan untuk bekerja dan berkiprah di ruang publik, muncul pertanyaan apakah emansipasi hanya untuk perempuan yang bekerja?; Apakah perempuan yang berkiprah di rumah tidak beremansipasi?. Berbagai pertanyaan tersebut tentu muncul sebagai bentuk kritis dari narasi besar yang diproduksi melalui tokoh Kartini. Sementara disisi lain, ada tokoh perempuan nasional yang mengajarkan keterampilan yang diperlukan perempuan dalam rumah tangga.

Perempuan memiliki peran yang signifikan dalam sejarah lokal dan nasional, baik sebagai tokoh dalam komunitas maupun sebagai bagian dari perlawanan terhadap kolonialisme. Namun hal tersebut sering terlupakan karena proses konstruksi sejarah yang cenderung didominasi oleh kekuasaan patriarki dan politik kolonial. Realitas historis perempuan kerap diabaikan dalam narasi sejarah Indonesia (Purwanto, 2006, hlm. 35) dan mengalami pengeksklusian dalam historiografi Indonesia (Wulandari, 2020, hlm. 138). Sebagai instrumen politik, pendidikan sejarah lebih berfokus pada tokoh besar dan peristiwa politik yang dianggap lebih penting (Kurniawan et al, 2019). Akibatnya perempuan 'menghilang' dari historiografi karena politik

dikonstruksikan sebagai ranah laki-laki (Kuntowijoyo, 2005; Rahayu, 2016). Kalaupun ada, sejarah perempuan yang ditulis lebih sering berfokus pada cerita-cerita heroik yang mendukung narasi nasionalisme atau modernitas. Pengalaman perempuan sehari-hari dan kontribusinya di ruang domestik atau komunitas jarang dianggap sebagai bagian penting dari sejarah bangsa. Hal serupa juga terjadi pada ranah domestik yang secara tradisional dikaitkan dengan perempuan, namun tetap saja dianggap tidak relevan dalam sejarah (Rose dalam Pamuk and Muç, 2021). Akhirnya sejarah perempuan kian tenggelam.

Dalam perspektif teori kritis, pendidikan sejarah tidak hanya berkaitan dengan pengajaran masa lalu, tetapi juga dengan relasi kekuasaan, produksi pengetahuan, serta cara memahami sejarah yang memengaruhi pola pendidikan. Sejarah tidak pernah netral atau objektif; ia merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh ideologi dengan tujuan tertentu (Naredi, 2020). Oleh karena itu, pendekatan kritis dalam pendidikan sejarah menjadi penting untuk membuka ruang bagi narasi yang lebih inklusif, termasuk sejarah perempuan. Melalui pelajaran sejarah, peserta didik akan memahami peran perempuan di masa lampau dan bagaimana perannya saat ini. Jika perempuan tidak ada dalam sejarah maka peserta didik perempuan menganggap bahwa mereka tidak berharga (*inadequate* dan *inferior*) (Mills, 1994) karena tidak ada representasi atau pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam sejarah.

Guru sejarah berperan penting dalam mengkonstruksi perspektif kritis dan inklusif tentang peran perempuan dalam sejarah. Guru sejarah, sebagai agen perubahan, tidak hanya dituntut untuk mengajarkan sejarah tetapi juga untuk menggali narasi-narasi alternatif yang dapat memperkaya pembelajaran sejarah. Pendekatan kritis yang dilakukan oleh guru sejarah dapat membantu peserta didik untuk memahami bahwa sejarah adalah produk konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan, ideologi, dan kepentingan tertentu. Guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk mempertanyakan narasi yang sudah mapan, menggali pengalaman perempuan yang terlupakan, dan membangun pemahaman sejarah yang lebih inklusif. Upaya tersebut sejalan dengan konsep dekonstruksi sejarah yang bertujuan untuk mengkaji ulang konstruksi narasi dominan dan membuka ruang bagi perspektif yang selama ini terpinggirkan.

Dekonstruksi merupakan pendekatan berpikir posmodernisme yang menantang kebenaran tunggal, mempersoalkan narasi dominan, serta membuka ruang bagi keragaman makna dan perspektif yang selama ini terpinggirkan (Barry, 2010; Turner, 2016). Dalam konteks sejarah, dekonstruksi digunakan untuk menelaah bagaimana narasi dibentuk dan siapa yang memiliki otoritas dalam pembentukannya, dengan tujuan membongkar klaim universalitas dan otoritas kebenaran yang sering melekat pada narasi besar (Lyotard, 1984; Altiria, 2023). Pendekatan ini tidak sekadar membongkar struktur yang ada, tetapi juga menyusun ulang pemahaman agar lebih reflektif, inklusif, dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan makna (Supriatna, 2008).

Dekonstruksi narasi sejarah perempuan juga relevan dalam konteks pendidikan sejarah yang bertujuan untuk membangun kesadaran kritis peserta didik. Pelajaran sejarah tidak hanya sekadar menyampaikan fakta atau cerita masa lalu, tetapi juga menjadi ruang untuk menganalisis bagaimana sejarah ditulis, siapa yang memiliki otoritas dalam menentukan narasi, dan bagaimana kekuasaan memengaruhi proses tersebut. Dalam hal ini, pendekatan kritis yang digunakan guru dapat membuka ruang diskusi tentang peran perempuan yang selama ini dianggap minor atau tidak signifikan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji upaya dekonstruksi terhadap narasi Sejarah Nasional Indonesia, baik melalui analisis terhadap nilai-nilai etika dan moral dalam karya sastra seperti *Serat Wedhatama* (Pujiarti & Sariyatun, 2017), pendekatan terhadap teori dan peristiwa kontroversial seperti tragedi 1965 (Gulo, 2018), maupun kajian terhadap narasi buku teks sejarah selama masa Orde Baru (Naredi, 2020) dan masa rezim militer (Purwanta et

al., 2023). Selain itu, studi internasional juga menunjukkan pentingnya dekonstruksi narasi sejarah dalam konteks pembelajaran, seperti yang terlihat dalam transformasi narasi buku teks sejarah di Finlandia pasca-Perang Dunia II (Ahonen, 2021). Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa dekonstruksi narasi sejarah penting untuk membuka ruang bagi perspektif yang lebih kritis dan inklusif terhadap masa lalu. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum secara khusus menyoroti narasi sejarah perempuan, terutama dalam konteks pembelajaran di tingkat sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi diskursus tersebut dengan fokus praktik pembelajaran yang diterapkan oleh guru sejarah dalam mendekonstruksi narasi sejarah perempuan.

Pentingnya dekonstruksi narasi sejarah perempuan juga sejalan dengan upaya untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Pendidikan sejarah yang inklusif tidak hanya memberikan penghormatan terhadap keberagaman pengalaman perempuan tetapi juga mendorong peserta didik untuk memahami kompleksitas sejarah bangsa secara lebih holistik. Dengan menggali cerita-cerita alternatif yang mencerminkan pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang, pendidikan sejarah dapat menjadi alat untuk memberdayakan perempuan sekaligus memperbaiki citra perempuan dalam sejarah yang selama ini sering kali bersifat marginal. Atas dasar uraian tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana guru sejarah mendekonstruksi narasi sejarah perempuan dengan pendekatan kritis. Perspektif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pendidikan sejarah yang lebih inklusif dan kontekstual, yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal tetapi juga mampu membangun kesadaran sejarah yang kritis di kalangan peserta didik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan dekonstruksi terhadap narasi sejarah. Studi kasus merupakan metode yang digunakan untuk memahami suatu kasus dalam konteks kehidupan nyata (Creswell, 2015). Dalam hal ini, penelitian berfokus pada bagaimana guru sejarah merefleksikan narasi sejarah perempuan. Subjek penelitian adalah dua guru sejarah SMA di Palembang, yaitu SM seorang guru sejarah di SMA Negeri Sumatera Selatan dan FEP guru sejarah di SMA LTI IGM yang dijadikan kasus untuk dianalisis berdasarkan konteks tersebut. Penelitian ini mengumpulkan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, pendekatan dekonstruksi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana guru sejarah membuka ruang bagi narasi besar (*grand narrative*) agar dapat dikritisi. Melalui proses ini, keberadaan *the other*—narasi alternatif yang selama ini terpinggirkan—dapat diungkap. Dalam konteks ini, kritik terhadap narasi besar, seperti representasi Kartini dan perempuan yang berperan dalam ranah publik yang lebih dominan dalam pembelajaran sejarah, memungkinkan munculnya narasi kecil dalam sejarah Indonesia. Pendekatan ini sekaligus mendukung terwujudnya pendidikan sejarah yang lebih inklusif.

Hasil Penelitian

Kartini, Dewi Sartika dan Konstruksi Perempuan Indonesia

Kartini lahir pada tahun 1879 di Mayong, Jepara sebagai putri dari R.M. Sosroningrat, seorang Bupati Jepara yang menikah dengan perempuan bernama Mas Ajeng Ngasirah. Kartini menempuh pendidikan formal di sekolah dasar Eropa atau "*Europese Lagere School*" (ELS) dan ketika memasuki usia 12 tahun, Kartini memasuki masa pingitan untuk belajar menjadi wanita Jawa bangsawan (Asmarani, 2017). Tradisi pingitan tersebut merampas kesempatan dirinya untuk bersekolah. Pengalaman ini menimbulkan keprihatinannya terhadap nasibnya sendiri dan perempuan Jawa bangsawan lainnya yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Kegelisahannya tersebut ia tuangkan dalam tulisan dan surat menyurat kepada sahabatnya

Jacques Henrij Abendanon dan Rosa Abendanon yang kemudian menerbitkan surat-suratnya dalam buku berjudul "*Door Duisternis Tot Licht*" (Habis Gelap Terbitlah Terang) pada tahun 1911 (Harnawan, 2021).

Selain keluarga Abendanon, Kartini juga menjalin persahabatan dengan beberapa orang Belanda yaitu Nyonya Marie Ovink-Soer, istri asisten residen Jepara dan Estelle Zeehandelaar (Stella). Melalui persahabatannya, Kartini mengungkapkan kegelisahannya terhadap berbagai persoalan, seperti belenggu adat dan tradisi, pendidikan, serta konflik sosial dan agama (Yulianti, 2017). Hubungan persahabatan tersebut juga memengaruhi pemikiran Kartini. Estella, misalnya, memiliki pandangan feminisme radikal yang menekankan pembebasan perempuan dari semua bentuk dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Estella digambarkan sebagai sosok yang pemberontak, progresif, mandiri, gemar bekerja, penyayang binatang, menentang poligami, dan menolak sistem patriarki. Sementara itu Ny. Abendanon memiliki karakter yang mendukung kebebasan individu, berorientasi pada kemajuan, berupaya meningkatkan status perempuan melalui pendidikan dan media, serta tidak menentang pernikahan (Muchoiyaroh, 2014)

Berbagai persoalan yang dihadapi perempuan, menurut Kartini, disebabkan oleh budaya feodal, patriarki, dan kurangnya akses terhadap pendidikan (Novasari et al, 1970). Atas dasar itulah, Kartini bercita-cita untuk mendirikan sekolah bagi perempuan. Namun, menjelang akhir hayatnya, ia belum sempat merealisasikan cita-cita tersebut. Gagasan Kartini akhirnya diwujudkan oleh Van Deventer melalui pendirian *Kartinischool* (Sekolah Kartini), sebuah sekolah untuk perempuan pribumi di Jawa. Sekolah ini bertujuan mempersiapkan anak-anak perempuan, terutama untuk peran yang dominan saat itu, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan ibu (Hernawan, 2021). Atas pemikirannya yang progresif, Kartini diangkat sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964 dan setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini (Marihandono et al. 2017).

Selain Kartini, konstruksi perempuan Indonesia lainnya yaitu Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir dari keturunan *menak* Sunda dengan julukan Juragan Dewi atau Juragan Ageung (Darmawan, 2017). Saat ditinggal kedua orang tuanya yang menjalani pengasingan ke Ternate, Dewi Sartika pindah ke Cicalengka dan hidup bersama keluarga Raden Demang Aria Surakarta Adiningrat (Lapian, 2012). Di sana, selain belajar membaca dan menulis, Dewi Sartika belajar tata cara dalam bertutur, bersikap, memasak, berdandan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pengurusan keluarga dan suami (Darmawan, 2017).

Perhatian Dewi Sartika terhadap perempuan, mengantarkannya untuk membangun sekolah khusus perempuan. Cita-citanya tersebut berhasil terwujud pada 16 Januari 1904 dengan berdirinya *Sakol Istri* di Bandung. Materi pelajarannya yaitu berhitung, membaca, menulis, pengetahuan agama, dan keterampilan (Notosusanto, 1968). Pada tahun 1910, *Sakola Istri* berganti nama menjadi *Sakola Kautamaan Istri*. Materi pelajarannya pun ditambah yang berkaitan dengan keterampilan wanita yaitu membatik, menjahit, merenda, menyongket, memasak, menyajikan makanan, memelihara bayi, mencuci, menyetrika, mengatur rumah, merawat orang sakit, olah raga dan kesehatan (Daryono, 1996). Sesuai dengan nama sekolah tersebut, Dewi Sartika berharap para murid perempuan memiliki keterampilan untuk dapat membina rumah tangga dengan baik. Selain itu, Dewi Sartika juga berharap bahwa perempuan yang menjadi Ibu harus cerdas karena Ibu merupakan pendidikan pertama yang memberikan pengaruh bagi kehidupan anak-anaknya. Jika martabat perempuan terangkat, maka kemajuan bangsa pun ikut terangkat (Darmawan, 2017). Atas perjuangannya Dewi Sartika dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 252 tanggal 1 Desember 1966.

Baik Kartini maupun Dewi Sartika memiliki visi yang sama, yaitu merintis pendidikan bagi perempuan yang terbelenggu oleh sistem feodalisme, meskipun keduanya menempuh pendekatan yang berbeda. Kartini memperjuangkan pendidikan perempuan melalui gagasan-gagasannya yang tertuang dalam surat-suratnya, sedangkan Dewi Sartika mewujudkannya secara langsung dengan mendirikan sekolah bagi perempuan (Lubis, 2006). Meskipun keduanya telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, hingga saat ini hanya Hari Kartini yang diperingati secara nasional, sementara tidak ada peringatan khusus secara nasional untuk mengenang Dewi Sartika. Kartini lebih dikultuskan dibandingkan dengan perempuan pahlawan nasional lainnya. Begitu pula, dalam pembicaraan mengenai emansipasi perempuan, Kartini sering kali menjadi tokoh yang paling populer dikaitkan. Mengapa demikian?. Pada dasarnya pembentukan *historical knowledge* atau pengetahuan sejarah bergantung pada akses terhadap berbagai sumber daya institusional yang memungkinkan proses rekonstruksi, produksi, dan distribusi informasi tentang masa lalu. Sumber daya tersebut berada di bawah kendali negara (Gulo, 2018). Pada masa itu, Soekarno sebagai representasi negara melihat Kartini sebagai figur yang melawan batasan sosial budaya yang diterapkan pada perempuan dalam masa kolonial. Menurut Arivia (2022) pengkultusan Kartini merupakan penjajahan epistemologis yang dibangun oleh kelompok elite dan rezim kolonial yang mengendalikan wacana tentang perempuan. Bagi Belanda, Kartini sangat penting seiring dengan euforia Politik Etis pada awal abad ke-20. Kartini dipromosikan oleh orang-orang Belanda sebagai produk pendidikan modern Belanda (Harnawan, 2021). Hal ini menjadikan Kartini lebih dikenal oleh kelompok elit dan kolonial dibandingkan dengan Dewi Sartika.

Teori Dekonstruksi Derrida

Dekonstruksi (Prancis: *déconstruire* yaitu membongkar) merupakan salah satu konsep berpikir posmodernisme yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida (*“Of Grammatology”*). Ia bermaksud menelaah secara kritis dan meruntuhkan berbagai asumsi mendasar yang menjadi dasar pemikiran dan keyakinan. Derrida menolak ilmu pengetahuan dan filsafat yang universal dan kebenaran absolut (Lubis, 2014; Sallis, 1987). Konsep dekonstruksi yang diperkenalkan Derrida merupakan gagasan Martin Heidegger (*“destruction”* dan *“Abbau”*). Menurut Heidegger, manusia bukan sekadar objek di dunia, tetapi merupakan makhluk yang sadar dan dapat merenungkan keberadaannya sendiri (Lubis, 2014). Dekonstruksi bukan tentang menemukan "makna tunggal" melainkan proses terus-menerus mempertanyakan asumsi, ide, dan pandangan yang ada (Turner, 2016).

Dekonstruksi adalah politis, dalam arti memiliki tujuan yang kuat dalam menantang cara-cara standar dalam memahami dunia dan apa yang dianggap sebagai kebenaran umum, lalu dekonstruksionisme mendorong untuk meninjau ulang segala sesuatu yang telah diterima begitu saja (Lubis, 2014). Menurut Barry (2010) dekonstruksi merupakan “cara memahami teks dengan pendekatan tidak konvensional” atau “menafsirkan teks dengan menantanginya secara internal” karena teks tidak dapat sepenuhnya memahami dirinya sendiri. Dekonstruksi mengkritik pandangan modernisme, di mana 'logos' menjadi pusat dominasi dalam pemikiran manusia, yang dikenal sebagai 'logosentrisme'. Pendukung logosentrisme mengutamakan hal-hal yang bersifat universal. Pada periode ini, manusia berupaya mencari kebenaran yang bersifat absolut, final, dan tunggal. Namun, pola pikir semacam itu dapat melahirkan dogma serta pembenaran terhadap kekuasaan. Dengan kata lain, logosentrisme semakin memperlebar kesenjangan antara kelompok penguasa dan yang tertindas, sehingga dominasi kekuasaan tetap terpelihara (Lubis, 2014; Altiria, 2023).

Dekonstruksi bertujuan untuk melepaskan keterikatan dalam sebuah struktur dan mengubah tatanan yang sudah mapan karena tradisi. Proses perubahan ini bukan berarti

menghancurkan struktur tersebut, melainkan membongkar elemen-elemennya untuk memahami bahan dasar pembentuknya, lalu menyusun ulang struktur tersebut dengan makna yang lebih reflektif dan beragam (Altiria, 2023; Supriatna, 2008). Pendekatan ini menantang pemahaman yang menganggap suatu konsep, institusi, atau praktik sebagai sesuatu yang tetap dan tak berubah. Dalam konteks sejarah, misalnya, dekonstruksi digunakan untuk **menelusuri** bagaimana suatu narasi dibangun, siapa yang memiliki otoritas dalam pembentukannya, serta bagaimana elemen-elemen tertentu sengaja dihilangkan atau ditekan dalam wacana dominan. Dengan demikian, dekonstruksi tidak hanya sekadar membongkar, tetapi juga menawarkan kemungkinan baru dalam memahami realitas dengan cara yang lebih inklusif, dinamis, dan terbuka terhadap berbagai perspektif.

Proses dekonstruksi sering dilakukan terhadap narasi besar (*grand narrative*), yaitu konsep yang merujuk pada cerita atau ide dominan yang memberikan penjelasan, pembenaran, atau makna bagi sejarah, budaya, atau masyarakat secara keseluruhan (Lyotard, 1984). Narasi besar biasanya mengklaim universalitas dan kebenaran tunggal, sehingga cenderung menyingkirkan perspektif lain yang tidak sejalan dengannya. Dekonstruksi yang mengkritisi narasi besar bermaksud membongkar klaim universalitas, otoritas, dan kebenaran tunggal yang melekat pada narasi tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana narasi besar sering mengabaikan konteks lokal, menekan perspektif alternatif, dan melanggengkan kekuasaan tertentu. Dekonstruksi mengungkap elemen-elemen yang tersingkirkan, menemukan kontradiksi internal, serta menggugat monopoli makna dan hierarki yang diciptakan oleh narasi besar. Dengan menekankan pluralitas dan ambiguitas makna, dekonstruksi membuka ruang untuk pemaknaan ulang dan keberagaman perspektif tanpa terikat pada kebenaran mutlak.

Dekonstruksi Sejarah Perempuan oleh Guru Sejarah Kritis: Kasus tokoh Kartini dan Dewi Sartika

Dalam tataran pedagogik sejarah, peran guru sejarah dan ketersediaan sumber sejarah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan (Supriatna, 2021). Guru merupakan kunci keberhasilan dalam memperkenalkan sejarah perempuan di kelas, dan konsepsi mereka membentuk cara sejarah diajarkan (Schmeichel, 2015). Guru sejarah yang kritis bukan hanya mengacu pada level kognitif yang tinggi tetapi juga guru sejarah yang menantang, dan mencoba mengubah struktur atau sistem yang dianggap tidak adil, tidak setara, atau menindas.

Secara filosofis, guru sejarah yang kritis berlandaskan pada teori kritis (*Critical Theory*). Teori kritis yang dikembangkan oleh Mazhab Frankfurt ini menyoroti berbagai permasalahan, seperti kritik terhadap kapitalisme, positivisme, hegemoni, dominasi, dan ideologi. Dari berbagai isu tersebut, "kritik" menjadi konsep utamanya. Kritik terhadap ideologi, misalnya, bertujuan untuk mendekonstruksi atau mengungkap lapisan ideologi yang sering kali menyembunyikan realitas sebenarnya. Teori ini berasumsi bahwa seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ilmu pengetahuan, tidak terlepas dari kepentingan ideologis yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu sekaligus merugikan kelompok lain (Nuryatno, 2011).

Meskipun hingga saat ini buku teks sejarah masih menjadi sumber utama yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran sejarah, guru sejarah kritis tidak akan terbelenggu dengan buku teks tersebut. Guru sejarah yang berperspektif kritis akan memanfaatkan pendekatan kritisnya untuk membangun pemaknaan baru yang mungkin berbeda dari isi buku teks. Tujuan pendekatan ini bukan untuk menghilangkan, mengabaikan atau mengganti apa yang telah disajikan dalam buku teks, melainkan untuk melakukan refleksi mendalam terhadap berbagai kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang relevan serta memahami bagaimana kondisi tersebut memengaruhi peserta didik. Pendekatan ini dapat diterapkan pada berbagai tema sejarah dalam kurikulum, seperti tema tentang sejarah perempuan.

Mengapa sejarah perempuan perlu diperhatikan? Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan terhadap konstruksi perempuan dalam buku teks sejarah, menunjukkan bahwa buku teks sejarah memiliki permasalahan dominasi patriarki, bias gender, keterbatasan dalam penggambaran peran dan agensi perempuan serta kelangkaan gambar perempuan (Briliani, 2016; Pranandari, 2018; Diana, 2022 dan Kurniawan, 2023). Sebagai sumber informasi yang dipercaya dan memiliki reputasi yang baik, buku teks seharusnya mampu menggambarkan perempuan secara menyeluruh dan adil. Jika perempuan tidak ada dalam sejarah maka peserta didik perempuan menganggap bahwa mereka tidak berharga (*inadequate* dan *inferior*) (Mills, 1994) karena tidak ada representasi atau pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam sejarah. Ketidakhadiran perempuan dalam sejarah juga disebabkan karena peran domestik perempuan sebagai ibu, istri, dan pelayan yang dianggap tidak relevan dengan sejarah (Rose dalam Pamuk & Muç, 2021) apalagi bidang politik yang dianggap ‘ranah maskulin’. Kalaupun ada, konstruksi perempuan seringkali dikaitkan dengan laki-laki. Belum lagi permasalahan ideologi dan narasi besar yang menyelimuti perempuan untuk tujuan tertentu seperti Kartini.

Penetapan 21 April sebagai Hari Kartini, yang masih diperingati hingga kini tidak lepas dari pengaruh politik. Soekarno melihat bahwa Kartini representatif sebagai perempuan yang memiliki gagasan melawan kolonialisme yang kemudian ditetapkan berdasarkan keputusan presiden No. 108 Tahun 1964. Sejak saat itu Kartini telah menjadi memori kolektif bangsa. Ia selalu dibicarakan bahkan hingga ruang kelas. Berbagai perspektif mengenai Kartini muncul seperti halnya dari guru sejarah kritis. Berikut kutipan wawancara dengan guru sejarah FEP:

Apakah sebenarnya kartini sebagai pahlawan?. *Lho*, beliau kan memang diminta oleh Belanda. Itu kan tidak tertulis dibuku teks” (wawancara guru FEP, 1 Nov 2024).

Pertanyaan kritis guru sejarah tersebut bertujuan untuk memantik diskusi dan membuka dialog yang lebih mendalam mengenai Kartini. Meskipun secara hukum (legal), Kartini telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, pertanyaan ini membuka ruang untuk berpikir kritis. Salah satu alasan munculnya diskusi ini adalah pandangan bahwa penetapan Kartini sebagai pahlawan nasional didorong oleh berbagai kepentingan. Kontroversi inilah yang kemudian menjadi ruang diskusi yang menarik dalam pembelajaran sejarah. Berbagai perspektif kritis terhadap pengkultusan Kartini juga muncul dari para akademisi, salah satunya Harsya W. Bachtiar. Dalam tulisannya yang berjudul "*Kartini dan Peranan Wanita dalam Masyarakat Kita*," ia menggugat pengkultusan Kartini sebagai pahlawan nasional.

Dari pikiran tersebut akan diikuti dengan perspektif lainnya sebagaimana yang disampaikan oleh guru sejarah FEP berikut:

Itu peran guru, sejauh apa peran Kartini, atau apa kepentingan Soekarno terhadap Kartini?. Kartini hanya mengirimkan surat. Menceritakan keluh kesah atas dirinya. Coba kita bandingkan dengan Rasuna Said bikin sekolah betul. Tapi coba lihat persentase perjuangan pendidikan yang diberikan itu. Mengajak mereka berliterasi, membaca, akhirnya...ooo ketika anda tidak meninggalkan tulisan, legasi anda hilang (wawancara guru FEP, 1 Nov 2024)

Pernyataan guru FEP tersebut menggambarkan bahwa ia tidak terikat pada konstruksi Kartini pada buku teks sejarah. Ia mengembangkan secara luar perspektif kritis mengenai Kartini. Guru FEP membangun kesadaran dan mengajak peserta didik untuk memikirkan bahwa penetapan Kartini sebagai pahlawan nasional tidak bebas nilai. Hal ini sejalan dengan pandangan teori kritis, yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak terlepas dari kepentingan ideologi. Secara politis, penetapan Kartini sebagai pahlawan nasional dilakukan

karena dianggap relevan dengan konteks masa itu, di mana bangsa Indonesia tengah gencar melawan kolonialisme dan sejalan dengan gagasan Kartini. Namun persahabatannya dengan Belanda kerap dicurigai bahwa Kartini merupakan kepanjangan tangan Belanda. Anggapan tersebut berlatar belakang setidaknya pada dua hal, *pertama*, persahabatan Kartini dengan orang-orang Belanda merupakan fakta sejarah. Komunikasi Kartini melalui surat menyurat dengan Estella Hartshalt Zeehandelaar dan Rosa Manuela Abendanon-Mandri turut mempengaruhi pemikiran Kartini. *Kedua*, gagasan Kartini sejalan dengan semangat Politik Etis, sehingga ia dipromosikan oleh orang-orang Belanda sebagai produk pendidikan modern Belanda (Harnawan, 2021). Promosi tersebut bermula dari penerbitan kumpulan surat-menyuratnya oleh J. H. Abendanon di Belanda.

Guru sejarah juga memberikan alternatif konstruksi perempuan selain Kartini yaitu Rasuna Said. Munculnya alternatif ini memberikan makna baru mengenai peran dan bentuk perjuangan perempuan dalam Sejarah Nasional Indonesia. Rasuna Said adalah seorang tokoh perempuan asal Sumatera Barat yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 084/TK Tahun 1974. Ia berasal dari keluarga yang terlibat dalam dunia politik, dengan ayahnya, Haji Muhammad Said, juga seorang aktivis. Rasuna Said memulai pendidikan di *Volkschool* Maninjau. Namun, setelah lulus, ayahnya tidak mengizinkan ia melanjutkan ke sekolah yang beraliran Belanda, sehingga ia melanjutkan studi di sekolah agama *Ar-Rasyidiyah* dan kemudian ke *Diniyah School* di Padang Panjang (Sufyan, 2022). Ketika di Padang, Rasuna melihat keterbelakangan perempuan sebagai akibat dari tradisi dan adat lokal yang menghalangi perempuan mendapatkan pendidikan. Ia pun membentuk kelompok PERMI (Persatuan Muslim Indonesia) khusus untuk perempuan dan anak perempuan, mendirikan sekolah dasar di Padang, dan mengajar di *Thawalib Putri School* (Sari et al, 2021; White, 2013). Rasuna juga menerbitkan sebuah majalah *Manara Poetri* (1937)

Peran Rasuna Said dalam sejarah Indonesia menggambarkan keberagaman peran perempuan dalam sejarah bangsa, sekaligus menegaskan bahwa ada tokoh perempuan lain selain Kartini. Melalui pemahaman ini, peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai alternatif peran yang dapat mereka ambil dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka dapat memilih untuk mengikuti jejak perjuangan Kartini atau Rasuna Said, yang meskipun berbeda, memiliki kesamaan dalam perhatian terhadap pendidikan perempuan dan kontribusi melalui tulisan. Seperti yang diungkapkan oleh guru FEP berikut:

...Mengajak mereka berliterasi, membaca, akhirnya...ooo ketika anda tidak meninggalkan tulisan, legasi anda hilang (wawancara guru FEP, 1 November 2024).

Baik Kartini maupun Rasuna Said menunjukkan kecintaan terhadap tulisan, yang menjadikan mereka tetap berpengaruh hingga saat ini. Konstruksi yang beragam tersebut juga dibangun dari guru sejarah SM yang memiliki perspektif kritis mengenai bentuk perjuangan perempuan, berikut kutipannya:

Pendidikan yang diajarkan perempuan itu bukan yang gimana-gimana tapi bagaimana nyuci baju, bagaimana keterampilan. Itu lo yang diajarkan. Artinya perempuan kodratnya sebagai ibu ada sebuah keterampilan dan tanggung jawab. Jadi jangan nganggep perempuan itu wah cuman dirumah. Cuman gini gini. Enggak. Itulah uniknya perempuan itu dia bisa sebagai seorang pekerja tapi di rumah bisa hebat. Dan teknik mencuci kalau ga pernah tau ya nanti praktiknya salah jadi itu perlu diajarkan ke siswa keterampilan menunjang kehidupan perlu diajarkan ke siswa (wawancara guru SM, 5 November 2024).

Menurutnya peran perempuan tidak semata-mata mengangkat senjata atau berkiprah di dunia politik, tapi dari ranah domestik perempuan juga turut serta ambil bagian dalam Sejarah Indonesia. Berikut kutipan wawancara dengan guru sejarah SM:

Materi peran perempuan itu, salah satu yang di Bandung itu. Dewi Sartika, yang diajarkan tentang teknik mencuci, menyetrika (Wawancara guru SM, 5 November 2024).

Jika Kartini direpresentasikan sebagai perempuan sukses dalam bidang pendidikan dan dunia kerja (Muhammad, 2016), maka guru SM membongkar narasi tersebut dengan menampilkan Dewi Sartika. Menurut guru SM pekerjaan domestik memerlukan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan rumah tangga secara efektif dan terampil. *Sakola Kautamaan Istri* yang dibangun oleh Dewi Sartika memiliki materi ajar mengenai keterampilan rumah tangga. Konsep ini tidak terlepas dari pengalaman pribadi Dewi Sartika selama menjalani kehidupan *abdi dalem* (membersihkan rumah, memasak dan menghidangkannya) saat tinggal bersama keluarga pamannya, Raden Demang Aria Surakarta Adiningrat di Cicalengka.

Perspektif kritis guru SM dalam mengkonstruksi peran Dewi Sartika dan keterampilan rumah tangga merupakan bagian dari pengalaman dan pandangannya bahwa perempuan perlu menyeimbangkan peran di rumah dan kerja, sebagaimana yang disampaikan guru SM berikut: ... saat dirumah dia memposisikan sebagai ibu. Di rumah lupakan pekerjaan fokus untuk rumah. Jadi tidak membatasi anak-anak untuk berkarir. Perempuan banyak yang hebat dari karir mengangkat derajat. Seimbang antara kerja dan rumah (wawancara guru SM, 5 November 2024).

Melalui pengalaman dan perspektif kritisnya, guru SM memberikan penjelasan kepada peserta didik bahwa pekerjaan rumah tangga bukanlah pekerjaan yang rendah. Setiap perempuan memiliki perjuangannya masing-masing seperti yang ia disampaikan berikut:

Ternyata perempuan itu berperan di bidangnya masing-masing. Kartini lewat surat-suranya jadilah buku yang kita kenal sekarang. Tapi Dewi Sartika itu juga nilai-nilai keperempuanan yang diajarkan. Ternyata perempuan itu berjuang juga, tetapi di sisi yang lain (Wawancara guru SM, 6 Februari 2025).

Perspektif kritis guru SM senada dengan pandangan Noddings (1992) bahwa perempuan perlu dilihat dalam segala sudut pandang—baik sebagai ibu rumah tangga maupun pejuang. Perempuan yang berperan dalam ranah domestik nyatanya telah terbukti relevan dalam sejarah seperti halnya yang dilakukan oleh para ibu rumah tangga saat revolusi di Yogyakarta. Para ibu rumah tangga berstrategi dan beradaptasi dengan cara mengolah singkong menjadi berbagai jenis makanan, seperti *tiwul* yang dicampur dengan kelapa, singkong rebus dengan lauk sayur gori (nangka muda) atau sayur pepaya. Mereka tidak hanya menyiapkan makanan hingga siap disajikan, tetapi juga memproduksi dan mendistribusikannya kepada para tentara yang berjuang di medan perang (Ningsih, 2024). Namun narasi ini tidak diuraikan dalam buku teks sejarah. Narasi perempuan lebih fokus pada keterlibatan perempuan sebagai pejuang atau politisi yang kemudian mengabaikan perempuan yang berperan dalam ranah domestik (narasi kecil). Dekonstruksi yang dilakukan guru SM membangun kesadaran dan refleksi bahwa sekalipun memutuskan ‘di rumah’ perempuan tetap harus berpendidikan karena pendidikan adalah hak semua manusia tanpa memandang jenis kelaminnya.

Guru FEP mengkritisi pengkultusan Kartini sebagai satu-satunya representasi perempuan Indonesia, yang membentuk memori kolektif bahwa kesuksesan perempuan diukur dari kemampuannya melanjutkan perjuangan Kartini melalui pencapaian pendidikan dan prestasi tinggi. Pandangan ini secara tidak langsung menciptakan standar tunggal bagi perempuan Indonesia. Akibatnya perempuan yang tidak mencapai standar tersebut akan mengalami

ketidakadilan dan penindasan yang terselubung. Hal yang sama dilakukan oleh guru SM, yang membongkar narasi perempuan sukses dalam dunia kerja. Dari perspektif kritisnya, guru SM menegaskan bahwa perempuan yang menjalani peran dalam keluarga atau rumah tangga tidaklah lebih rendah. Mengelola rumah tangga dan keluarga juga membutuhkan pendidikan, sehingga peran domestik tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang kurang bernilai dibandingkan peran di ruang publik.

Kritik yang dilakukan guru FEB dan SM tidaklah bertujuan meruntuhkan citra Kartini sebagai representasi perempuan Indonesia atau merendahkan perempuan yang berkarir. Sebaliknya, melalui perspektif kritis, mereka menolak oposisi biner yang memusatkan makna pada satu narasi tunggal. Dengan pendekatan ini guru FEB dan SM berupaya membuka ruang bagi narasi-narasi kecil (*the other*) serta menawarkan perspektif alternatif dalam memahami peran perempuan dalam Sejarah Indonesia. Apa yang dilakukan oleh kedua guru tersebut merupakan bagian dari proses dekonstruksi yang mengungkap dan memberikan tempat bagi suara-suara yang selama ini terabaikan atau tidak dihargai dalam konstruksi sejarah dominan.

Guru sejarah kritis tidak hanya mengajarkan sejarah sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan ideologi tertentu. Dalam konteks sejarah perempuan, guru sejarah kritis berupaya membongkar narasi besar yang selama ini mendominasi wacana sejarah nasional, salah satunya adalah pengkultusan Kartini. Melalui pendekatan kritis, guru sejarah tidak hanya menghadirkan tokoh perempuan dalam sejarah, tetapi juga menyoroti peran domestik perempuan yang sering kali terabaikan dalam historiografi nasional. Proses dekonstruksi ini bermaksud untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran perempuan dalam sejarah serta menekankan pentingnya keberagaman perspektif dalam pembelajaran sejarah. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mengenal berbagai tokoh perempuan dari perspektif yang sempit, tetapi juga dapat memahami bagaimana peran perempuan telah berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Upaya ini juga mencerminkan pentingnya pendidikan sejarah yang tidak hanya menampilkan perempuan sebagai simbol emansipasi di ruang publik, tetapi juga mengakui dan menghargai peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Kesimpulan

Pendidikan sejarah merupakan instrumen politik sekaligus alat penanaman ideologi yang strategis. Dominasi *grand narrative* dalam wacana pendidikan sejarah kerap menyebabkan ketidakadilan, salah satunya terhadap perempuan. Untuk membongkar wacana tersebut, diperlukan kehadiran guru sejarah kritis. Guru FEB, misalnya, mengkritisi Kartini sebagai satu-satunya representasi perempuan Indonesia. Sementara itu, guru SM menerapkan perspektif kritis dengan menampilkan peran perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam sejarah, yaitu peran domestik. Melalui tokoh Dewi Sartika, guru SM menekankan bahwa perempuan yang berkontribusi dalam rumah tangga-melakukan pekerjaan seperti mencuci dan menyetrikan-juga merupakan bagian dari perjuangan.

Perspektif kritis guru sejarah berupaya mendekonstruksi narasi tunggal yang bias serta menciptakan representasi sejarah perempuan yang lebih inklusif. Pendekatan dekonstruksi memberikan makna baru terhadap peran dan bentuk perjuangan perempuan dalam Sejarah Nasional Indonesia. Pengalaman guru sejarah menjadi kunci agar pembelajaran sejarah tidak hanya terjebak dalam buku teks, tetapi juga lebih reflektif, relevan, dan bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran sejarah tidak hanya membentuk kesadaran historis peserta didik, tetapi juga membuka ruang bagi mereka untuk mempertanyakan dan mendekonstruksi berbagai narasi besar yang selama ini dianggap sebagai kebenaran absolut. Dengan memberikan ruang bagi

pengalaman dan peran perempuan dalam sejarah, pendidikan sejarah dapat menjadi alat transformasi sosial yang lebih adil dan inklusif.

Daftar Rujukan

- Altiria, S. (2023). Dekonstruksi Derrida Pada Kajian Linguistik Kognitif. *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya (KOLITA)*, 21(21), 270-281. <https://doi.org/10.25170/kolita.21.4857>.
- Arivia, G. (2022). Menumbuhkan Analisis Dekolonialisasi di Indonesia: Studi Pemikiran Toeti Heraty, Kartini, dan Siti Roehana, Sebuah Refleksi Kritis Filosofis dan Feminis. *Jurnal Perempuan*, 27(2), 101-111. <https://doi.org/10.34309/jp.v27i2.694>.
- Asmarani, R. (2017). Perempuan Dalam Perspektif Kebudayaan. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(1), 7-16. <https://doi.org/10.14710/sabda.v12i1.15249>.
- Azhari, I. (2019). Dekonstruksi Pembelajaran Sejarah Lokal Di Kepulauan Riau. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 28(2), 152–163. <https://doi.org/10.17509/jpis.v28i2.21067>.
- Barry, P. (2010). *Beginning Theory: Pengantar Komprehensif Teori Sastra dan Budaya*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Briliani, A. M. (2016). *Analisis Wacana Kritis: Representasi Perempuan Dalam Buku Teks Sejarah Indonesia Berdasarkan Kurikulum 2013 kelas X, XI dan XII Sekolah Menengah Atas*. [Skripsi, Universitas Negeri Malang]. Repositori Kampus UM. <https://repository.um.ac.id/54878/>.
- Darmawan, W. (2017, Oktober 25). *Dewi Sartika dan Pendidikan Perempuan Indonesia* [Presentasi konferensi]. Seminar Nasional Dewi Sartika, 2017, Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta.
- Daryono, Y. (1996). R. Dewi Sartika. Jakarta: Yayasan Awika & PT Grafitri Budi Utami.
- Derrida, J. (1974). *Of Grammatology*. Baltimor: John Hopkins.
- Diana, I. (2022). Representasi Gender Pada Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XI Kurikulum 2013. *Jurnal Factum*, 13(2), 81-90. <https://doi.org/10.17509/factum.v13i2.51001>.
- Gulo, F. (2018). Teori Dekonstruksi dan Dekonstruksi Teori: Strategi Pembelajaran Alternatif pada Teori-Teori Sejarah Kontroversial Peristiwa 1965. *Prosiding Seminar Nasional FKIP*, 82-96. <https://doi.org/10.24071/snfkip.2018.10>.
- Harnawan, T. (2021). Setelah Kepergian Kartini: Propaganda Kartini dalam Euforia Kolonial, 1904-1939. *Jurnal Sejarah*, 4(1), 52-67. <https://doi.org/10.26639/js.v4i1.332>.
- Kuntowijoyo. (2005). *Metodologi Sejarah (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Kurniawan, G. F., Wanto, W., & Sutimin, L. A. (2019). Dominasi Orang-Orang Besar Dalam Sejarah Indonesia: Kritik Politik Historiografi dan Politik Ingatan. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(1), 36-52. <https://doi.org/10.14710/jscl.v4i1.21576>.
- Lubis, A. Y. (2014). *Postmodernisme Teori dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, N. H. (2006). *9 Pahlawan Nasional Jawa Barat*. Bandung: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lemlit Universitas Padjajaran.

- Lyotard, J. F. (1984). *The Postmodernism Condition: A Report on Knowledge*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Mills, C. E. (1994). "The portrayal of women in history textbooks". Tesis. California State University. <https://scholarworks.lib.csusb.edu/etd-project/885>.
- Muchoiyyaroh, L. S. (2014). Pengaruh Pemikiran Wanita-Wanita Eropa Terhadap Pemikiran Kartini Tentang Peran Dan Status Sosial Perempuan di Hindia Belanda. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 2(3), 526–539. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/9161>.
- Muhammad, H. (2016). *Semiotika fashion atas perayaan Hari Kartini*. International Seminar on Kartini in Zaman Baru: Reflections on the Condition of Contemporary Indonesian Women. Universitas Hasanuddin. https://www.researchgate.net/publication/321344786_SEMIOTIKA_FASHION_ATAS_PERAYAAAN_HARI_KARTINI.
- Naredi, H. (2020). Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Dekonstruksi Sejarah. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.17509/historia.v3i1.20731>.
- Ningsih, W. F. (2024). Perempuan dan Ketahanan Pangan (Rumah Tangga) pada Masa Revolusi. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 9(1), 27–43. <https://doi.org/10.14710/jscl.v9i1.59981>.
- Novasari, R. O., Budianto, K., & Darmawan, E. (1970). Gagasan Feminisme dalam Surat-Surat R.A. Kartini. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 1(2), 68–80. <https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13734>.
- Nuryatno, M. A. (2011). *Mazhab Pendidikan Kritis Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Sleman: Resis Book.
- Pamuk, A., & Muç, K. (2021). Women's Gender Roles in History Textbooks in Turkey. *International Journal of Psychology and Educational Studies*, 8(2), 133–147. <https://doi.org/10.52380/ijpes.2021.8.2.391>.
- Purwanta, H., Pelu, M., & Bramastia. (2023). Deconstructing Modernism Discourse in Indonesian History Textbooks During The Military Regime (1975-1998). *Multidisciplinary Reviews*, 6(1), 2023008. <https://doi.org/10.31893/multirev.2023008>.
- Pranandari, N. (2018). *Bias Gender Dan Marginalisasi Perempuan dalam Buku Teks Sejarah SMA (Sebuah Studi Analisis Wacana Pada Buku Teks Sejarah Indonesia SMA Kelas X)*. [Tesis, Universitas Negeri Malang]. Repositori Kampus UM. <https://repository.um.ac.id/113833/>.
- Pujiarti, R., & Sariyatun. (2014). *Dekonstruksi nilai-nilai etika dan moral dalam Serat Wedhatama sebagai media pembelajaran*. Seminar Nasional Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Malang. <https://www.neliti.com/id/publications/172324/dekonstruksi-nilai-nilai-etika-dan-moral-dalam-serat-wedhatama-sebagai-media-pem>.
- Rahayu, R. I. (2016). Menulis Sejarah Sebagaimana Perempuan: Pendekatan Filsafat Sejarah Perempuan. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 10(1), 95–104. <https://doi.org/10.17977/um020v10i12016p095>
- Sari, J., Wahyuni, A., & Purnomo, B. (2021). Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui

- Sejarah Hidup Hajjah Rangkyo Rasuna Said. *Al-Fikru: Jurnal Pendidikan dan Sains*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.55210/al-fikru.v2i1.584>.
- Schmeichel, M. (2015). Skirting Around Critical Feminist Rationales For Teaching Women In Social Studies. *Theory & Research in Social Education*, 43(1), 1–27. <https://doi.org/10.1080/00933104.2014.1002648>.
- Sufyan, F. H. (2021). Melumpuhkan Rasuna Said: Menuntut Indonesia Merdeka Tahun 1932. *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 1(1), 41–50. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/JDH/article/view/4829/3033>.
- Supriatna, N. (2008). Dekonstruksi sejarah perang kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara dalam pedagogi sejarah. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 9(2), 105–112. <https://doi.org/10.17509/historia.v9i2.12177>.
- Supriatna, N. (2021). The Creative History Teacher as A Creative Historian. *Paramita: Historical Studies Journal*, 31(2), 281–290. <https://doi.org/10.15294/paramita.v31i2.31341>.
- White, S. (2013). Rasuna Said: Lioness of the Indonesian Independence Movement. In S. Blackburn & H. Ting (Eds.), *Women in Southeast Asian Nationalist Movements*. Singapore: NUS Press.
- Wulandari, A. (2020). Presenting Women In Post-Independence Historiography: Building The Character of Defending The Country Through The History. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(2), 133-149. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.894>.
- Yuliati, D. (2017). Kartini: Sang Penyibak Fajar Nasionalisme Indonesia. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(1), 17-27. <https://doi.org/10.14710/sabda.12.1.17-27>.